



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 100 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG  
BERSUMBER DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2013  
PADA DPD/DPW PARTAI POLITIK**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2013 pada DPD/DPW Partai Politik tanggal 10 Februari 2015 Nomor 04/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/02.2015, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik.

KEDUA : Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menggunakan dana bantuan keuangan pada Partai Politik.

KETIGA : Berkoordinasi dengan Ketua DPC PDI Perjuangan, Ketua DPD Partai Hanura, Ketua DPW Partai Amanat Nasional, Ketua DPD Partai Golkar, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera, Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan, Ketua DPD Partai Gerindra dan Ketua DPD Partai Demokrat, agar memerintahkan Bendahara masing-masing dalam penggunaan dana bantuan keuangan partai politik memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung dengan bukti yang lengkap dan valid serta lebih cermat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2015  
Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta